



Judul : Garuda Dipersilakan Suspen Pihak Lessor
Tanggal : Jumat, 29 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ada Dugaan Mark Up Pesawat

Garuda Dipersilakan Suspen Pihak Lessor

ANGGOTA Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta maskapai Garuda Indonesia melakukan suspen atau penundaan terhadap seluruh kewajiban ke pihak lessor atau penyedia pesawat. Hal ini jika terbukti ada mark-up terhadap harga sewa pesawat. Tindakan lessor ini dinilai mencederai prinsip *business ethic and law* sehingga menyebabkan kerugian pada Garuda.

“Hukum harus ditegakkan bagi para ‘penjahat kerah putih’ yang telah melakukan mark-up atas leasing pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda. Ini harus dibongkar, sehingga ketahuan siapa yang menikmati adanya *mark up* itu,” tegas Evita dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Evita meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan mark up ini. Pengusutan itu harus

dilakukan terhadap semua mantan direksi Garuda Indonesia yang harusnya ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung negara tersebut.

“Garuda Indonesia pantas untuk melakukan renegotiasi ulang, dan kalau perlu denganancaman untuk mensuspen seluruh kewajiban Garuda terhadap lessor yang terbukti melakukan mark up,” wanti politisi perempuan PDI Perjuangan ini.

Mengenai solusi bagi penyelesaian Garuda, Evita menegaskan, fraksinya pasti akan selalu meninggat faktor kesejarahan Garuda sebagai *flag carrier*. Juga membela kepentingan karyawan maskapai penerbangan ini. Solusi penyelesaian Garuda dilakukan tanpa harus menanggung beban akibat tindakan mark-up leasing pesawat.

“Kita tegaskan membela kar-

yawan, dan menindak para eksekutif Garuda yang telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kongkalikong dengan lessor tertentu,” ucapnya.

Evita kemudian berkaca pada kasus pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce pada periode 2004-2015 yang ditangani KPK. Kala itu, KPK menemukan adanya dugaan mendongkrak harga sewa pesawat diatas ketentuan yang sepatutnya. Sementara selisih harga tersebut masuk ke kantong pribadi.

KPK saat itu berpendapat, sebagai perusahaan milik negara, Garuda harusnya mencari harga termurah dari suatu produk. Namun, terdapat pihak yang ingin mendapat keuntungan sehingga membuat perusahaan justru membeli barang dengan harga yang sengaja dimahalkan. ■ KAL